



PENGUATAN KEBIJAKAN PENURUNAN KEMISKINAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN STUNTING DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pendahuluan

Salah satu indikator yang selalu menjadi polemik yang ramai dibahas oleh para pemangku kebijakan adalah kemiskinan. Setiap penyelenggaraan pemerintah senantiasa ingin menurunkan kemiskinan, namun berbagai jurus kebijakan belum menghasilkan buah yang berarti. Kemiskinan satu digit masih menjadi dambaan setiap pemerintahan, termasuk pemerintah kabupaten lombok barat. Dalam satu dekade terakhir, telah terjadi penurunan kemiskinan yang progresif di Lombok Barat. Di tahun 2010 persentase penduduk miskin Lombok Barat masih bertengger pada angka 21,59 persen hingga berada di urutan 407 diantara kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Memasuki tahun 2023 kemiskinan melandai ke angka 13,67 persen dan mengantarkan Lombok Barat pada urutan ke 376 diantara kabupaten/kota se-Indonesia. Di penghujung RPJMN ini, tentu saja kemiskinan akan kembali menjadi sorotan terkait capaiannya. Manuver kebijakan agaknya perlu dilakukan sebagai upaya mempercepat laju penurunan kemiskinan menjadi satu digit di Lombok Barat.

Belum rampung urusan penurunan kemiskinan, menyeruak isu baru yang mendesak untuk segera diselesaikan untuk menjaga kualitas penerus bangsa. Berdasarkan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2019, Lombok Barat termasuk kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di tahun 2020 bersama dengan Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima dan Lombok Utara. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara stunting dan kemiskinan. Secara umum stunting biasanya terjadi pada penduduk miskin akibat rendahnya pendapatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya asupan nutrisi anak (Damayanti dan Sentosa, 2020). Dalam studi kasus di Desa Kanigor Gunung Kidul, Ngaisyah (2015) mendapatkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ayah, tingkat pekerjaan dan pendapatan terhadap kejadian stunting. Artinya pada prinsipnya efisiensi dapat dilakukan dalam merumuskan kebijakan dimana penurunan kemiskinan dan penurunan stunting dapat saling berdampingan dijalankan.

Melalui kajian ini diharapkan dapat digali lebih dalam kondisi kemiskinan dan stunting di Lombok Barat sehingga untuk menyusun RPJMN 2025-2029 akan lebih tajam dan target yang dipasang juga lebih realistis.

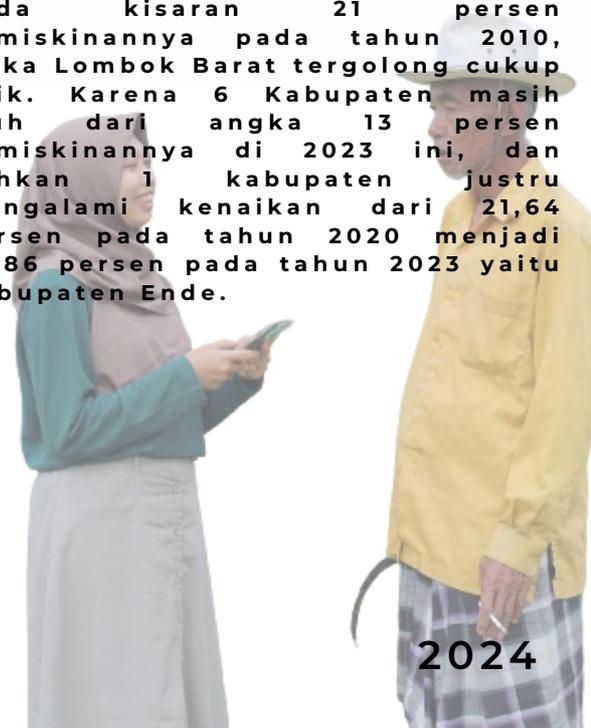
Kemiskinan Lombok Barat dalam Perbandingan

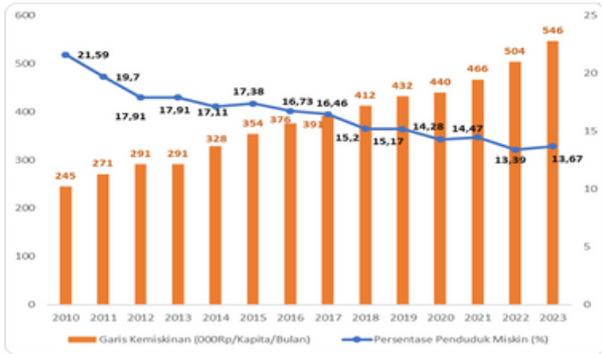
Salah satu penyebab perdebatan terkait kemiskinan adalah karena belum banyak yang memahami apa itu kemiskinan terutama dalam konsep BPS karena selama ini hal itu yang menjadi tolak ukur. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan basic needs approach yaitu kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun non makanan. Dengan garis kemiskinan 2023 sebesar Rp546.421,- per kapita per bulan artinya orang yang pengeluarannya kurang dari Rp18.214,- per hari di Lombok Barat masuk dalam kategori miskin.

Dalam 14 tahun terakhir, garis kemiskinan di lombok barat meningkat tajam dan belum pernah sekalipun mengalami penurunan. Berbeda dengan persentase penduduk miskin yang beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif dan melambat penurunannya. Terakhir kali Lombok Barat mengalami penurunan kemiskinan di atas 1 persen terjadi di tahun 2018, dimana kemiskinan turun 1,26 persen dibanding tahun 2017. Dan sedikit disayangkan karena pada tahun 2023 justru kemiskinan mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan 12 kabupaten lain se-Indonesia yang sama-sama berada pada kisaran 21 persen kemiskinannya pada tahun 2010, maka Lombok Barat tergolong cukup baik. Karena 6 Kabupaten masih jauh dari angka 13 persen kemiskinannya di 2023 ini, dan bahkan 1 kabupaten justru mengalami kenaikan dari 21,64 persen pada tahun 2020 menjadi 22,86 persen pada tahun 2023 yaitu Kabupaten Ende.

Pesan Kunci :

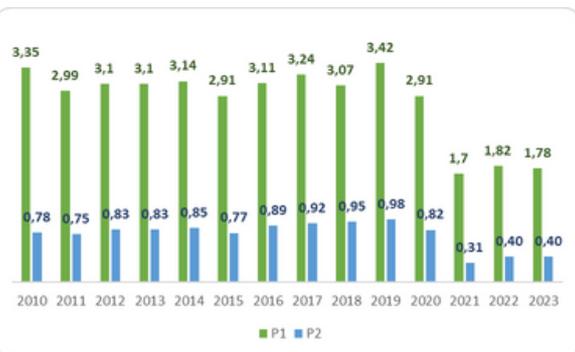
- Dalam satu dekade terakhir telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat dari 21,59 % pada tahun 2010 menjadi 13,67 % di tahun 2023
- Diperlukan manuver kebijakan untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan agar mencapai angka satu digit di Lombok Barat
- Selain menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat salah satu isu baru yang harus segera diselesaikan adalah masalah stunting
- Berdasarkan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2019, Lombok Barat termasuk kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting pada tahun 2020.





Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2023

Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan jarang sekali dilirik. Padahal kedua indikator ini penting untuk menggambarkan kualitas dari penduduk miskin dalam konteks kemampuannya berbelanja per hari. Indeks kedalaman kemiskinan atau yang dinamakan P1 adalah nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sederhananya semakin besar nilai P1 maka semakin rendah pengeluaran penduduk dari nilai garis kemiskinannya. Keparahan kemiskinan yang dinamakan P2 merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara sederhana keparahan kemiskinan adalah gambaran kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin satu dengan penduduk miskin lainnya. Semakin besar nilai P2 maka semakin timpang pengeluaran antar penduduk miskin.



Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat 2010-2023

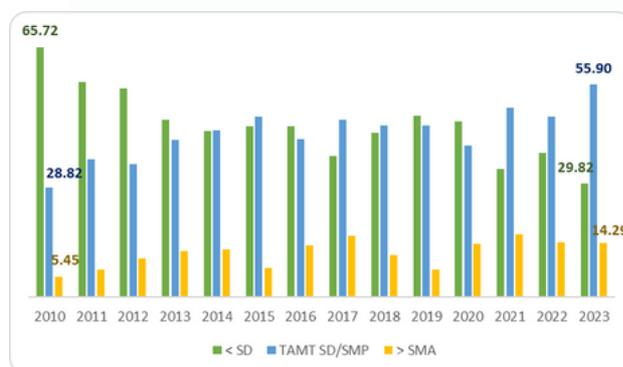
Kedalaman kemiskinan semakin mengecil hingga tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin sebenarnya hanya memerlukan sedikit stimulan agar pengeluarannya bisa mencapai garis kemiskinan.

Yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah penduduk hampir miskin, yang pengeluarannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Dikaitkan dengan garis kemiskinan 2023 senilai Rp18.214,-, bisa jadi penduduk hampir miskin di Lobar pengeluaran hariannya hanya bernilai Rp19.000,- saja. Artinya mereka ini akan rentan dengan perubahan harga, ketika harga melonjak dan penghasilan tidak berubah, mereka dapat dengan mudah menjadi miskin.

Keparahan kemiskinan yang semakin mengecil menjadi indikasi baik, bahwasanya penduduk miskin semakin homogen pengeluarannya. Kondisi ini menjadi sinyal baik bahwasanya kebijakan yang diterapkan akan mengena kepada mayoritas penduduk miskin, hingga jika efektif akan banyak menurunkan angka kemiskinan

Gambaran Pendidikan Penduduk Miskin

Beberapa penelitian telah membuka mata bahwasanya pendidikan orang tua khususnya ibu memengaruhi risiko stunting pada anak. Rachman, RY et.al (2021) diantaranya mengungkapkan bahwa semakin rendah pendidikan orang tua semakin sedikit pengetahuannya terkait asupan gizi anak sehingga meningkatkan risiko anak stunting. Gizi baik tidak harus mahal, dalam hal ini pengetahuan orang tua yang masuk dalam kategori penduduk miskin menjadi penting agar dapat mencari jenis asupan makanan yang murah, terjangkau dan bahkan dapat dihasilkan sendiri di rumah tangganya.



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15+ Kabupaten Lombok Barat Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2010-2023

Jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, maka penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang tidak

sekolah maupun tidak tamat SD semakin berkurang. Namun yang perlu dicermati adalah peningkatan cukup signifikan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang hanya tamatan SD/SMP dan bahkan yang berpendidikan lebih dari SMA karena kecenderungannya terus meningkat. Indikasinya adalah dalam berjalannya waktu, pendapatan penduduk tamatan SD/SMP semakin sulit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, demikian halnya dengan yang berpendidikan lebih dari SMA.

Terkait stunting, dengan semakin banyaknya penduduk miskin yang tamat SD ke atas artinya moda untuk sosialisasi pemberantasan stunting akan semakin tersedia. Setidaknya yang lebih berpendidikan akan lebih mudah menerima pengetahuan terkait pencegahan stunting, tinggal bagaimana pemerintah dapat menjembatani sekaligus menjadi corong untuk menggalakkannya.

Kondisi Ketenagakerjaan Penduduk Miskin

Karena miskin dalam konteks BPS terkait pemenuhan kebutuhan dasar yang didekati dari pengeluaran penduduk, maka upaya untuk memperoleh penghasilan perlu disoroti yaitu melalui kondisi ketenagakerjaannya. Kualitas pekerjaan dipengaruhi oleh pendidikan, melihat banyaknya penduduk miskin yang berpendidikan tamat SD/SMP artinya peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan layak semakin kecil. Tamat SD/SMP umumnya bergelut dalam pekerjaan kasar ataupun berpenghasilan rendah. Perlu digaris bawahi bahwa belum tentu seseorang itu menjadi miskin karena tidak bekerja. Kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin perlu disimak agar tidak terjadi misleading dalam menduga penyebab kemiskinan.



Gambar 4. Kondisi Ketenagakerjaan Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2023

Persentase penduduk miskin bekerja selalu lebih tinggi dari penduduk miskin yang tidak bekerja. Insting manusia untuk bekerja demi mempertahankan hidup berlaku disini, dimana penduduk miskin terindikasi akan bekerja apapun jenis pekerjaannya dan berapapun penghasilannya, namun hanya sekedar untuk menyambung hidup sehari-hari. Yang perlu disoroti adalah kendati fluktuatif, sejak 2011 hingga 2023 persentase penduduk miskin bekerja mengalami trend yang meningkat. Kondisi ini memberikan signal bahwa bukan soal jumlah lapangan pekerjaan yang harus diberi kebijakan, namun terkait kualitas pekerjaan dan penghasilannya yang patut dikawal pemerintah dalam rangka membantu penduduk miskin keluar dari kemiskinan.

Tabel 1. Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal Informal Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2023

Tahun	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
2020	35,88	21,05
2021	42,28	20,15
2022	41,27	20,39
2023	49,86	17,46

Sektor informal adalah sektor yang tahan terhadap kondisi yang tidak menentu, dan cenderung menjadi tempat tumpangan dari bagi mereka yang berhenti bekerja di sektor formal baik terpaksa maupun voluntarily. Data memperlihatkan bahwa penduduk miskin yang bekerja di sektor formal Lombok Barat berkurang diiringi dengan meningkatnya penduduk bekerja di sektor informal. Indikasinya adalah mereka tidak dapat bertahan di sektor formal dan beralih bekerja di sektor informal. Ciri khusus sektor informal adalah berskala kecil dan tidak terorganisir dan identik dengan kurangnya akses permodalan. Melihat banyaknya persentase penduduk miskin di Lombok Barat yang bekerja di sektor informal, kebijakan pemerintah perlu berpihak kepada mereka.

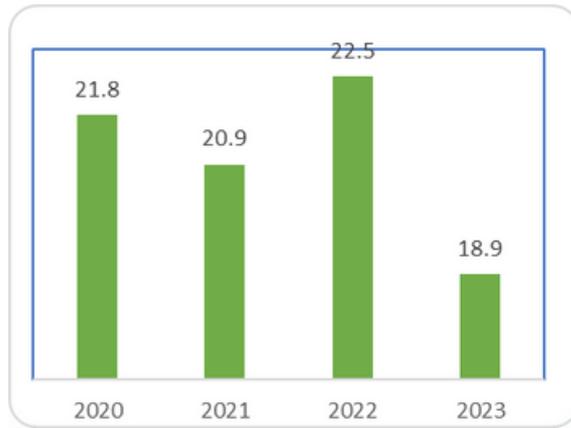


Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Bekerja Kabupaten Lombok Barat Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010-2023

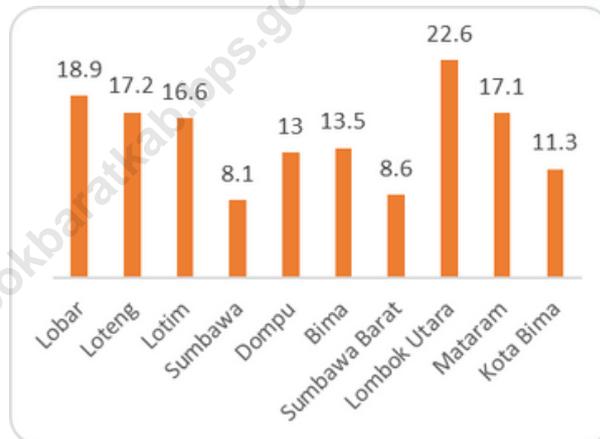
Dalam sepuluh tahun terakhir tercatat bahwa penduduk miskin lebih banyak bekerja di pertanian. Menurut hasil Sensus Pertanian 2023, sebagian besar usaha pertanian perorangan menggeluti sub sektor peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Ini merupakan kekuatan Lombok Barat dan perlu dikawal agar menjadi penyokong ketahanan pangan untuk menurunkan kemiskinan dan stunting. Sensus Pertanian 2023 juga menunjukkan bahwa petani pengguna lahan maupun petani gurem mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Perlindungan bagi petani gurem yang hanya pengguna lahan perlu menjadi target kebijakan yang menyokong program penurunan kemiskinan dan stunting.

Stunting dan Pengeluaran Makanan Penduduk Miskin

Berdasarkan penelitian, penduduk kaya di perkotaan maupun perdesaan lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk komoditas bukan makanan. Ini adalah hal yang wajar karena pada umumnya orang miskin mencari nafkah hanya untuk bisa bertahan hidup, yaitu makan. Penghasilan yang mereka peroleh bahkan terkadang belum mencukupi untuk memperoleh makanan yang layak, dan ini juga menjadi salah satu pemicu stunting. Pada tahun 2023 persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin Kabupaten Lombok Barat untuk makanan mencapai 73,93%. Yang lebih menarik lagi baik penduduk miskin maupun tidak miskin di Lombok Barat pada tahun 2023 sebagian besar pengeluaran per kapitanya masih dialokasikan untuk makanan (59,51 persen). Kondisi ini bisa menjadi titik masuknya intervensi kebijakan stunting untuk penduduk miskin. Karena alokasi pengeluaran sebagian besar untuk makanan, maka program penurunan stunting dapat lebih menjurus kepada peningkatan kualitas makanan. Menjaga ketersediaan pangan bergizi yang murah, merumuskan jenis makanan kaya vitamin yang dapat dihasilkan sendiri oleh setiap keluarga dan mengkampanyekannya ke masyarakat, menjaga stabilitas harga bahan pokok adalah beberapa hal yang dapat dijadikan terobosan pemerintah. Kebijakan ini perlu dipilah dalam dua tujuan yaitu untuk penanganan kondisi eksisting dan pencegahan dalam jangka panjang.



Gambar 6. Prevalensi Stunting Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2023



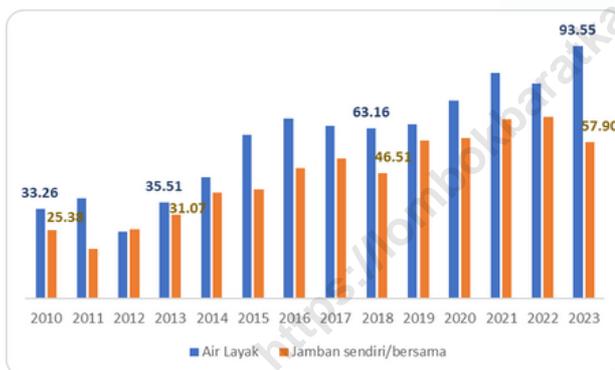
Gambar 7. Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2023

Sumber: Ditjen Bangda Kemendagri

Prevalensi stunting Kabupaten Lombok Barat sempat melonjak di tahun 2022, namun di tahun 2023 turun cukup signifikan ke angka 18,9. Fluktuasi angka stunting ini memberikan indikasi bahwa program yang dijalankan belum menyentuh tujuan keberlanjutan dan kesinambungan, dan lebih difokuskan pada penanganan. Disandingkan dengan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, prevalensi stunting Lombok Barat masih tergolong cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan koreksi agar kebijakan penurunan stunting dapat lebih tajam lagi menyasar balita di Lombok Barat. Berdasarkan data Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 persentase balita stunting pendek mencapai 14,28 persen dan balita stunting sangat pendek mencapai 4 persen.

Kondisi yang Meningkatkan Risiko Stunting Penduduk Miskin

Kendati sasaran prioritas program stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 HPK, agaknya sudut pandang penanganan stunting perlu diperlebar hingga dapat juga menyentuh penurunan kemiskinan. Dalam hal intervensi gizi sensitif, penyediaan air layak dan sanitasi menjadi pokok bahasan penanganan stunting. Jika pada tahun 2010 persentase penduduk miskin yang menggunakan air layak masih berada di angka 33,26 persen, bersyukur pada 2023 sudah mencapai 93,55 persen. Peningkatan juga tampak pada persentase penduduk miskin yang sudah menggunakan jamban sendiri/bersama dan di tahun 2023 sudah mencapai 57,90 persen. Kendati sudah bertambah, namun kenaikan persentase penduduk miskin pengguna jamban sendiri/bersama cukup lambat dalam 13 tahun terakhir.



Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2023.

Jamban sendiri/bersama merupakan bagian dari sanitasi layak yang secara ilmiah telah dibuktikan memiliki andil dalam memicu risiko stunting. Hampir separuh penduduk miskin di tahun 2023 belum memiliki akses terhadap sanitasi layak berupa jamban sendiri/bersama di Lombok Barat. Hal ini patut disikapi dengan mereviu kembali kebijakan yang telah dijalankan apakah telah menyentuh akses masyarakat terhadap jamban. Kurangnya akses terhadap jamban khususnya untuk penduduk miskin dapat disebabkan karena mereka tidak mampu membangun jamban sendiri maupun bersama, atau di lingkungan mereka tidak tersedia akses untuk jamban sehat umum maupun bersama. Jamban masuk dalam kategori sehat jika air yang digunakan untuk membasuh juga air yang layak dan tempat pembuangan akhir kotoran berada

pada jarak aman yang mencegah kontaminasi ke sumber air. Dengan akses terhadap air layak yang sudah cukup tinggi, seharusnya akses terhadap jamban sehat juga dapat seiring sejalan sektor informal, kebijakan pemerintah perlu berpihak kepada mereka.

Penguatan intervensi pemerintah dalam kebijakan penurunan kemiskinan dan stunting merupakan hal yang sejatinya diperlukan. Regulasi dan penganggaran merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penurunan kemiskinan dan stunting. Efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas program yang dijalankan. Dan pada akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat haruslah merancang kebijakan yang lebih tajam dan efektif untuk menysasar penduduk miskin dan stunting.

Rekomendasi

Semua program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan. Setelah diperoleh gambaran terkait kondisi penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2010 dan keterkaitannya dengan risiko stunting, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat menambah wacana untuk menyempurnakan kebijakan yaitu:

1. Perkuat program yang dapat meningkatkan pendapatan pekerja di sektor informal mengingat sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor formal. Beberapa aksi yang dapat dilakukan diantaranya: Padat karya desa, diklat wirausaha yang sekaligus memberikan akses modal awal, menjangkau penduduk tamatan SD/SMP untuk diberi pelatihan keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan besar lokal kemudian menyepakati MOU dengan perusahaan besar lokal untuk menerima peserta diklat berprestasi dengan perjanjian gaji minimal setara UMK, kemudahan akses KUR yang tidak perlu menggunakan jaminan tanah. Jika perbankan tidak dapat melonggarkan terkait jaminan, berdayakan koperasi maupun badan amal masjid untuk bisa memberikan kredit usaha untuk penduduk miskin.

2. Bantuan dan subsidi bagi petani gurem dan pengguna lahan. Bantuan bibit dan pupuk yang sudah berjalan agar terus berlanjut dengan lebih menysasar kepada petani gurem dan pengguna lahan. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya: Bibit tidak hanya untuk tanaman pangan namun juga untuk

hortikultura dan peternakan; mengizinkan petani miskin untuk bercocok tanam di lahan pemerintah yang tidak digunakan; membuka akses pemasaran hasil produk pertaniannya langsung kepada konsumen untuk memutus rantai calo yang memicu kenaikan harga di konsumen namun disisi petani tetap merugi karena dibeli dengan harga rendah.

3. Bantuan bibit makanan kaya gizi dan vitamin untuk keluarga miskin. Misal setiap keluarga miskin diberikan 2 ekor ayam petelur dan bibit anak ayam untuk dipelihara di rumah. Diberikan bibit untuk menanam ubi, alpukat atau makanan bergizi lain di pekarangan. Memanfaatkan pekarangan masjid untuk menanam makanan bergizi yang dapat dipanen oleh warga miskin secara gratis.

4. Sosialisasi pencegahan stunting yang sistematis dan berkala. Sosialisasi dapat dilakukan di posyandu setiap bulan, di kantor desa setiap bulan, di masjid-masjid setiap jum'at, di sekolah-sekolah (terutama SMP dan SMA). Sosialisasi di sekolah SMP maupun SMA penting karena selain mereka dapat menyampaikan informasi kepada orang tua mereka, mereka juga adalah calon-calon ibu di masa depan yang bertanggung jawab atas kesehatan calon anaknya kelak. Sosialisasi/kampanye ini jangan hanya menasar perempuan melainkan juga laki-laki. Kaum pria harus ikut peduli pada pemenuhan gizi keluarga, dan setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada istrinya untuk menjaga gizi anak.

5. Galakkan program anak asuh dengan menasar anak miskin dan diprioritaskan yang menderita stunting di lingkungan masing-masing. Satu kepala dinas 1 anak asuh, satu kepala bidang 2 anak asuh, 1 sekolah (sekolah dari PAUD, SD, SMP dan SMA) 1 anak asuh, 1 kepala sekolah 1 anak asuh dan beberapa unsur pemerintahan lain yang sekiranya memungkinkan untuk mengasuh anak miskin prioritas yang stunting. Mengasuh dalam hal ini bukan berarti mengadopsinya dan membawanya pulang untuk diasuh di rumah, melainkan memberi sumbangan rutin setidaknya untuk kecukupan gizi si anak asuh.

6. Perkuat stabilitas harga karena garis kemiskinan dipengaruhi perubahan harga dan penduduk rentan miskin akan mudah menjadi miskin apabila terjadi lonjakan harga. Jaga pasokan pangan ke Lombok Barat. Usahakan untuk menjadi produsen untuk diri sendiri agar tidak menggantungkan diri dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pokok.

7. Perkuat data sektoral untuk memperoleh sasaran program yang tepat sasaran. OPD selaku produsen data agar memperoleh rekomendasi dari BPS agar data yang dihasilkan berkualitas dan terpercaya. Dinas Kominfotik selaku walidata agar memperkuat fungsi forum data dalam menyelaraskan data target penerima perlindungan sosial dari setiap OPD yang memiliki anggaran.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2020). Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2018-2019. Badan Pusat Statistik.

Damayanti, D. A., & Sentosa, S. U. (2020). Analisis Kausalitas Stunting, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 45-48. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>

Fahar, F. (2015). Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Kepulauan Riau 2014: Permasalahan dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Keuangan*.

Farisa, P. F. R., Maharani, R. N., Nurrachma, M., Siswanto, T. N. A., Dwiastuti, W., Nurrachman, W., & Mulyadi. (2023). Kemiskinan Struktural Akibat Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jupendis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 44-59.

Ngaisyah, Rr. D. (2015). Hubungan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Desa Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul. *Jurnal Medika Respati*, X(4), 65-70.

Rajab, B. (2006). Memaknai Kemiskinan: Peran Kelembagaan Dalam Menanggulangi Lingkaran Setan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 8(2), 43-74.

Sari, C. A., & Munawar, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).

Subarna, T. (2012). Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non Pangan Penduduk Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*, 4(4), 243-250.

Sulistyo Rini, H. (2012). Dilema Keberadaan Sektor Informal. *Jurnal Komunitas Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 200-209. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>

Wulandari, I. D. A. M. I., & Budiantara, I. N. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin dan Pengeluaran Perkapita Makanan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Non Parametrik Birespon Spline. *Jurnal Sains Dan Seni POMITS*, 3(1), 2337-3520.

Yuliana Rachman, R., Putu Ayu Larassasti, N., Aria Nanda, S., Rachsanazani, M., & Amalia, R. (2021). Hubungan Pendidikan Orang Tua Terhadap Stunting Pada Balita: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(2), 61-70.